

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Evaluasi kebijakan Publik*. Malang: FI UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan. Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Grafindo.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. PT. Rineka Cipta.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coinsidine, Mark. (1995). *Public Policy: a Critical Approach*. Prentice Hall.
- Hadi, Sutrisno. (1986). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kurniasih, Sri.(2007). *Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petukangan Utara*. Jakarta Selatan.
- Moleong, Lexy J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salahudin, Anas. (2010). *Bimbingan dan Konseling.CV*. Bandung: Pustaka Setia.
- Silaen, Sofar. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (p. 19). Jakarta: IN Media.
- Sinulingga, B.D. (2005). *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Sutama. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Surakarta: Fairuz Media.
- Thoha, M. (2012). *Birokrasi pemerintah dan kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Waarden, F.V. (1992). *Dimensions and Types of Policy Networks*. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

JURNAL

- Carlsson, A., Greengard, P., Kandel, E. (2000). *Nerve Signaling: An Introduction: Inos and NADPH oxidase* (pp. Volume 35, Part 5). Biochemical Society Transactions.
- Gartika Dewi. Muthya Diana. 2020. *Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Ecovillage Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Volume: 6. Nomer:1. BPPD Jawa Barat.
- Hidayat, A.R., Alwi, Gita Susanti. (2015). *Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba)*. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanudin, 1 (2) Des, p. 209-219
- Indri Sari, Diah. (2019). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura. Volume 8, Nomor 4
- Masya Ade dan kawan-kawan (2017). *Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru*. Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia, Volume 2, Nomor 2
- Maya Adita dan Susie Perbawasari. (2016). *Proses Seleksi Lokasi Pada Program Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata Di Kota Depok*. Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 21 No. 1

Pujiyono, Bambang., Arfian., Subiyakto, Rudi. (2021). *Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor*. Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat. Vol. I No.1, Hal: 01-07.

Suwitri, Sri. (2008). *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang*. Jurnal Delegasi STIA Vol. VI No.3.

Tardiyo, Dedy. (2020). *Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 7 No. 2

Yuliani Sri dan Gusty Putri Dhini Rosyida. (2017). *Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Jurnal Wacana Publik, Vol. 1, no 2

DOKUMEN

Perda No. 2 Tahun 2004 Kota Batam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (2011)

SITUS

Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2017. Tentang Program Kotaku. <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> Diakses pada 13 April 2021 pukul 12:23 WIB

Menyusun RPJMD Kota, Perwujudan Batam Kota Layak Huni dan Berkelanjutan. <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=8257&catid=2&> Diakses pada Februari 19, 2021

Peran Pemda sebagai “Nakhoda” menuju Batam 0 Ha kumuh. <http://kotaku.pu.go.id/view/3853/peran-pemda-sebagai-%E2%80%9Cnakhoda%E2%80%9D-menuju-batam-0-ha-kumuh/print>. Diakses pada 15 April 2021 pukul 20:56 WIB